

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT MEDIASI DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Th. Kussunaryatun

Abstract

This research was conducted to assess the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in the District Court of Surakarta, and factors of barriers to the implementation of mediation, and the solution. This research is non doctrinal/social research that is descriptive. Data used mainly primary data, supported by secondary data. Determination of resource persons with purposive sampling. Data collection using interviews and literature study and analyzed by interactive model. Already implement the provisions in Perma No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in District Court, in particular already provides ten mediators listed in mediator, despite the fact that the parties prefer to judge rather than a mediator mediators are not judges. The judges examiner case requires the parties to implement the mediation process, and the stages in the process of mediation has been conducted in accordance with the provisions of Article 13 through Article 20 Perma No. 1 / 2008. Barriers that arise in the mediation process, particularly come from the parties themselves, who maintain negative traits such as high self-esteem, feel the most right, will not budge at all, more content to accept the decision of the judge rather than accept the deed for peace. Barriers also arise from the lawyer as a power law, which is actually hinder its clients to conduct mediation. Limited the number of mediators Judge is also a barrier to mediation because the workload of judges other than as a case examiner both civil and criminal matters, also must act as a mediator. Third party consisting of relatives or friends of the parties sometimes also gives a negative effect so that mediation is not achieved. The solution of these constraints are by growing awareness of the benefits of the parties to achieve mediation with the direction, approach and motivation provided by the mediator, lawyer as its legal counsel or by a third party. Need to increase the number of mediators and judges. The Supreme Court immediately assign a mediator of behavior guidelines and incentives for mediators judges. .Need intensive socialization of Perma No. 1 / 2008 to the parties involved in civil disputes and to the community.

Keywords: Constraints Factor, Mediation, Civil Dispute

A. Pendahuluan

Proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri selalu diawali dengan perdamaian atau mediasi yang diusahakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Mediasi dapat dilaksanakan sepanjang proses pemeriksaan, sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg mengatur tentang perdamaian. Majelis hakim pengadilan negeri dapat mengusahakan perdamaian, apabila pada hari sidang yang ditentukan ke dua belah pihak hadir. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Untuk meningkatkan terlaksananya mediasi, Mahkamah Agung beberapa kali membuat peraturan tentang mediasi, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung membuat peraturan mediasi yang lebih lengkap, yaitu Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tanggal 31 Juli 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Banyak sekali manfaat yang dapat dinikmati oleh para pihak, apabil mereka melaksanakan mediasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Diperlukan kebesaran hati dari masing-masing pihak, advokat yang menjadi kuasanya, ataupun mediator yang memfasilitasi terwujudnya perdamaian tersebut, karena terciptanya mediasi membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan dari masing-masing pihak.

Menurut Yahya Harahap penyelesaian perkara melalui perdamaian, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi, seperti *summary jury trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis (Yahya Harahap, 2004 :236).

Banyak faktor penghambat terciptanya mediasi, apalagi jika gugatan sudah dimasukkan pengadilan negeri. Pada umumnya masing-masing pihak lebih puas menjalani pemeriksaan perkara untuk akhirnya memperoleh putusan hakim. Faktor merasa paling benar dan harga diri, menyebabkan masing-masing pihak berusaha saling mempertahankan haknya. Terciptanya mediasi kadang-kadang menyebabkan tidak terpenuhinya seluruh tuntutan yang diajukan, karena dengan mediasi para pihak diharapkan mau mengorbankan sebagian tuntutannya, agar sengketa dapat lebih cepat terselesaikan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk lebih mendorong terlaksananya mediasi di pengadilan. Perlu diadakan penelitian, apakah dikeluarkannya PERMA tersebut dapat mendorong jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi, ataukah sama saja keadaannya sebelum berlakunya PERMA. Apakah dengan PERMA tersebut proses pelaksanaan mediasi dapat lebih mudah dan sederhana, sehingga menarik keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Perlu diteliti faktor apa saja sebetulnya yang menghambat tercapainya mediasi, dan bagaimana solusi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, supaya lebih banyak jumlah sengketa perdata yang diselesaikan dengan mediasi. Berdasarkan uraian di muka permasalahan penelitian ialah: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan? *Kedua*, Apa Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Mediasi

Beberapa pengertian tentang mediasi atau perdamaian di antaranya diatur di dalam *Herziene Inlands reglement(HIR)* dan *Rechtreglemen Buitengewesten (Rbg)*.

Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG:

" Jika pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mengusahakan perdamaian dengan perantara ketuanya. Jika perdamaian tercapai, maka dibuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan

hukum pasti. Tidak diperkenankan banding terhadap putusan perdamaian. Seorang juru bahasa dapat digunakan pada waktu usaha perdamaian.

Adi Sulistiyono mengartikan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak luar yang tidak memihak, yaitu mediator, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Mediator memberikan bantuan substantif, procedural dan saran, sedangkan keputusan tetap pada konsensus para pihak sendiri (Adi Sulistiyono, 2010 : 6).

Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Peranan hakim atau majelis hakim dalam usaha untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa sangat menentukan. Hakim dapat memberikan saran-saran, pandangan-pandangan dan penjelasan-penjelasan kepada para pihak untuk mengakhiri sengketa perdata dengan suatu perdamaian (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 86).

Dengan perdamaian faktor yang ditonjolkan bukannya mana yang salah dan mana yang betul, tetapi bagaimana duduk persoalannya agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya (Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1980 : 77).

2. Proses Mediasi

Proses mediasi adalah sebagai berikut.

- a. Paling lama lima hari kerja setelah penunjukkan mediator, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal memilih mediator, paling lama lima hari kerja, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- b. Proses mediasi paling lama 40 hari setelah terpilihnya mediator, dan dapat diperpanjang selama 1 hari. Jangka waktu mediasi tidak diperhitungkan dengan jangka waktu pemeriksaan perkara.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan "KAUKUS", yaitu pertemuan antar mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lawannya, dan dapat pula mendatangkan seorang "AHLI", yang dapat membantu penyelesaian perkara.
- d. Apabila tercapai perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis dan ditanda tangani para

pihak dan mediator, kemudian para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang untuk memberitahukan adanya perdamaian untuk dapat dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian". Jika para pihak tidak menghendaki "Akta Perdamaian", maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

- e. Apabila perdamaian gagal, mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal, kemudian hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Usaha mediasi tetap dapat dilakukan hakim sepanjang proses pemeriksaan, sebelum putusan hakim dijatuhkan. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan, apabila mediasi gagal.

3. Mediasi di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- a. Mediasi dapat dilakukan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kesepakatan perdamaian disampaikan kepada ketua pengadilan tingkat pertama, yang segera memberitahukan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang berwenang atau ketua mahkamah agung tentang maksud para pihak untuk berdamai.
- b. Apabila perkara sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, hakim wajib menunda pemeriksaan selama 14 hari sejak menerima pemberitahuan, jika berkas masih di pengadilan tingkat pertama, pengiriman berkas perkara ditunda untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

4. Manfaat Mediasi

Yahya Harahap secara terperinci menguraikan berbagai keuntungan penyelesaian perkara melalui perdamaian, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi, expert determination atau atau mini trial. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa keuntungan substansial dan psikologi, diantaranya: penyelesaian bersifat informal, penyelesaian sengkera diserahkan pada kemauan para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian lebih cepat, biaya

ringan, aturan pembuktian tidak perlu dengan prinsip pembuktian yang formil, proses penyelesaian bersifat rahasia atau konfidensial, komunikasi aktif antara para pihak berdiabat kooperatif, komunikasi aktif antara para pihak dan focus penyelesaian, hasil yang diharapkan win-win solution, bebas emosi dan rasa dendam. (Yahya Harahap, 2004 : 273).

5. Faktor Penghambat Mediasi

Faktor penghambat mediasi adalah sebagai berikut.

- a. Faktor harga diri dari masing-masing pihak untuk lebih dahulu mempunyai inisiatif menawarkan perdamaian kepada pihak lawan.
- b. Faktor merasa paling benar, sehingga merasa berat untuk berkorban demi kebaikan kedua belah pihak.
- c. Faktor lebih puas terhadap segala sesuatu yang nantinya diputuskan hakim.
- d. Faktor tidak terpenuhinya seluruh keinginan yang dituntut oleh masing-masing pihak.
- e. Adanya pengaruh pihak ketiga untuk menyerahkan kepada putusan hakim. (Th. Kussunaryatun, 1982 : 36).

6. Pelaksanaan Hukum di Dalam Masyarakat

Teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, mengemukakan adanya sistem hukum yang mempunyai tiga unsur, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1988 : 35)

a. Struktur (*Structure*)

Struktur hukum berarti suatu kerangka, yaitu bagian yang tahan lama. Struktur juga diartikan bagaimana lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang diorganisir.

b. Substansi (*Substance*)

Substansi berarti peraturan perundang-undangan yang konkrit, norma-norma dan pengaturan pola tingkah laku masyarakat dalam suatu sistem hukum.

c. Budaya hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide, dan harapan masyarakat terhadap sistem hukum atau sebagai budaya masyarakat yang memperhatikan (*concern*) terhadap sistem hukum.

Kekuatan berlakunya Undang-Undang sehubungan dengan apa rasional Undang-Undang, harus memenuhi tiga pernyataan, sebagai berikut. (Soerjono Soekanto, 1988 : 13)

- a. Kekuatan berlaku secara yuridis (*Juristische Geltung*)
Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang telah terpenuhi.
- b. Kekuatan berlaku sosiologis (*Sociologis Geltung*)
Berlakunya hukum atau tidak diterimanya hukum di dalam masyarakat lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat.
- c. Kekuatan berlaku filosofis
Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila keadaan kaedah hukum tersebut sesuai dengan "cita-cita hukum" (*Rechtisidae*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*Uberpositive Werte*).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian hukum ini, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik penentuan responden dilakukan secara *purposive*. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan dua mediator hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, yaitu Asra, SH.MH dan M. Najib Sholeh, SH serta mempelajari berkas perkara perdata yang mediasinya berhasil yaitu perkara Nomor 53/Pdt.G/2009/PN.Ska, Nomor: 177/Pdt.G/2009/PN.Ska dan Nomor: 53/Pdt.G/2009/PN.Ska dikaitkan dengan berlakunya Ps. 130 HIR dan PERMA No 1 Th 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perlu diadakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta

a. Tahap Pra Mediasi

Pengadilan Negeri Surakarta telah memiliki "Daftar Mediator" yang berisi sejumlah 10 mediator yang terdiri atas mediator hakim empat orang, akademisi satu orang dan dari kalangan advokat lima orang. Dari kesepuluh mediator hakim yang

selama ini dipilih para pihak untuk menangani proses mediasi sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta, para pihak yang terlibat sengketa perdata selama ini lebih memilih mediator hakim daripada mediator bukan hakim. Alasannya karena para pihak tidak dipungut biaya, dan adanya komunikasi yang lebih mudah. Mediator hakim di Pengadilan Negeri Surakarta belum tentu telah memiliki sertifikat mediator, hal ini tidak dilarang oleh Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut, pada dasarnya semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat menjadi mediator, apabila belum ada hakim yang memiliki sertifikat mediator. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahkan hakim majelis pemeriksa perkara kalau terpaksa dapat menjadi mediator (Pasal 8(1) d). Di Pengadilan Negeri Surakarta belum pernah menetapkan hakim majelis pemeriksa perkara menjadi mediator, karena dikawatirkan tidak dapat bertindak secara adil dan obyektif.

Mediator hakim di Pengadilan Negeri Surakarta telah melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang mediator sesuai ketentuan Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Hal-hal yang belum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan alasan karena memang belum ada peraturan dari Mahkamah Agung yaitu mengenai belum adanya :

- 1) Pedoman perilaku mediator yang harus ditaati oleh setiap mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator. (Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2008)
- 2) Pedoman tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Sampai saat ini mediator hakim belum pernah menerima insentif apabila berhasil dalam mediasi Pasal 25 juga mengatur bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi. Tidak ditegaskan bentuk sarana apa yang akan disediakan oleh Mahkamah Agung.

b. Tahap Proses Mediasi

1) Kewajiban Mediasi

Pada waktu Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Surakarta, pada umumnya pada hari itu juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan majelis hakim pemeriksa perkara, kemudian majelis hakim pemeriksa perkara akan segera menetapkan hari sidang.

Sidang pertama dilaksanakan antara sepuluh hari sampai dengan empat belas hari setelah penetapan hari sidang. Pada sidang pertama tersebut, apabila ke dua belah pihak hadir, ketua majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mengharuskan kedua pihak untuk melaksanakan mediasi, dengan menawarkan mediator yang dapat dipilih dari "Daftar mediator"

Para pihak biasanya memilih mediator hakim pada hari sidang pertama. Ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan membuat "Surat Penetapan Mediator". Usaha majelis hakim untuk mengadakan mediasi merupakan kewajiban yang diharuskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya.

Apabila para pihak gagal dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara, baik yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat, untuk menjalankan fungsi mediator.

2) Pelaksanaan Mediasi

Pengadilan Negeri Surakarta sudah melaksanakan seluruh dalam pelaksanaan mediasi, yaitu :

- a) Pertama-tama mediator membuka pertemuan antara penggugat dengan tergugat, dan memperkenalkan diri. Mediator menegaskan bahwa dirinya adalah mediator yang netral artinya bahwa seorang mediator harus obyektif, independent dan tidak memihak pada salah satu pihak. Para pihak nantinya yang berwenang mengambil keputusan, mediator hanya membantu para pihak (Pasal 1).

- b) Mediator bersama para pihak menyusun jadwal pertemuan, yang harus ditepati oleh para pihak. Ketidakhadiran para pihak atau kuasa hukumnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan selama dua kali berturut-turut, mengakibatkan mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal. Mediator menegaskan bahwa proses mediasi tenggang waktunya paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim, dan dapat diperpanjang selama 14 hari (Pasal 13). Jangka waktu mediasi tidak termasuk dalam jangka waktu proses pemeriksaan perkara. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1992, proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi wajib diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Selama ini proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dapat diselesaikan antara 21 hari sampai dengan 28 hari, jadi tidak melebihi tenggang waktu yang sudah diatur Pasal 13 tersebut.

- c) Mediator selanjutnya mempersilahkan masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya. Mediasi harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai ketentuan Pasal 12. Mediator wajib mendorong para pihak untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi. Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, mediator dapat berkomunikasi dengan para pihak. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator, sesuai Pasal 13.
- d) Mediator wajib mendengarkan dan memperhatikan pendapat masing-masing pihak, meng-

ajukan pertanyaan atau mere-dam pernyataan para pihak yang terlalu emosional. Mediator juga dapat menawarkan solusi yang sifatnya saling menguntungkan kepada ke dua belah pihak (*win-win solution*).

- e) Mediator dapat mengadakan “kaukus” (Pasal 15) yaitu pertemuan antara mediator dan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lawannya.
- f) Mediator dapat mengundang seorang ahli dengan persetujuan ke dua belah pihak (Pasal 16).
- g) Mediator menyimpulkan pokok permasalahan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kesepakatan, maka hasil kesepakatan dirumuskan dengan jelas secara tertulis. Mediator menjelaskan akibat hukum dari penyelesaian sengketa perdata dengan mediasi dan penjelasan lain yang diperlukan. Jika tercapai kesepakatan maka mediator akan memberitahukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi berhasil dan dilampiri dengan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak. Jika perundingan kesepakatan tidak berhasil, mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal. Mediator memberitahukan kepada ketua majelis hakim tentang kegagalan tersebut.
- h) Mediator menutup proses mediasi secara formal.

3) Mediasi Berhasil

Apabila kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara dengan mediasi, maka dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan bantuan mediator dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Mediator akan mencermati kesepakatan perdamaian tersebut untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik (periksa Pasal 17 (1),(2),(3)).

Kesepakatan perdamaian selanjutnya oleh mediator disampaikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara bersama dengan surat pemberitahuan dari mediator kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara yang memberitahukan bahwa proses mediasi yang ditanganinya telah berhasil mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, majelis hakim membuat akta perdamaian, yang amarnya sebagai berikut.

- a) Menghukum ke dua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian.
- b) Menghukum ke dua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar.....

Pasal 17 (4) (5):

- (1) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (2) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Akibat hukum dikuatkannya kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, disamakan dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Apabila salah satu pihak di kemudian hari tidak memenuhi isi akta perdamaian, pihak lawannya dapat langsung mengajukan eksekusi. Jika perkara tersebut diajukan kembali di pengadilan negeri, maka perkara akan ditolak dengan alasan *ne bis in idem* (perkara yang sama dengan pokok sengketa yang sama dan pihak –pihak yang sama, tidak dapat diajukan untuk ke dua kalinya di pengadilan yang sama atau pengadilan yang sama tingkatnya).

Ada kemungkinan para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian tidak dikuatkan dalam akta perdamaian. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan perdamaian harus di tambah klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 17 (6) :

- (3) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan akta perdamaian, pencabutan gugatan atau klausula pernyataan perkara telah selesai, akibat hukumnya lebih kuat akta perdamaian. Dengan pencabutan gugatan atau pernyataan perkara telah selesai, masih ada kemungkinan di kemudian hari pihak yang tidak puas terhadap kesepakatan perdamaian mengajukan gugatan baru, sehingga perkara akan muncul kembali.

4) Mediasi gagal

Tidak perlu menunggu tenggang waktu 40 kerja sebagaimana ditentukan dalam tenggang waktu pelaksanaan mediasi, yang dapat diperpanjang selama 14 hari, mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi gagal, khususnya apabila :

- a) Salah satu pihak, para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi yang sudah dijadwalkan dan telah disepakati, tanpa alasan setelah dipanggil dengan patut (Pasal 14 ayat 1).
- b) Apabila sengketa yang sedang dimediasi melibatkan harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugat, oleh karena itu pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, sehingga perkara tidak layak di mediasi, dengan alasan para pihak tidak lengkap. (Pasal 14 (2)).

Mediator yang memutuskan bahwa proses mediasi gagal segera mengirimkan pemberitahuan secara tertulis tentang kegagalan proses mediasi kepada ketua majelis hakim

pemeriksa perkara, selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara akan segera melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Majelis hakim pemeriksa perkara tetap dapat mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi selama proses pemeriksaan perkara, sebelum putusan hakim dijatuhkan, dan harus dilangsungkan paling lama 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginannya untuk mengadakan perdamaian.

Pasal 18 :

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Kegagalan mediasi mengakibatkan pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Catatan mediator harus dimusnahkan, dan mediator tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara tersebut, serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata (Periksa Pasal 19).

2. Faktor Penghambat Terlaksananya Mediasi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, dan Solusinya

Beberapa hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri pada umumnya dan di Pengadilan Negeri Surakarta pada khususnya, di antaranya :

- a. Para pihak tidak menghendaki adanya proses mediasi sejak perkara di antara mereka diajukan pemeriksaannya ke pengadilan negeri. Alasannya sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan negeri, para pihak telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan perdamaian di luar sidang, tetapi tidak berhasil. Para pihak dengan terpaksa mengajukan perkara ke pengadilan negeri sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Menurut para pihak proses mediasi tidak ada gunanya, karena dapat dipastikan akan mengalami kegagalan. Akibatnya mereka tidak merespon dengan baik usaha-usaha dari mediator untuk tercapainya mediasi, dengan cara tidak pernah hadir pada pertemuan yang sudah dijadwalkan.

Solusinya, ketua majelis hakim pemeriksa perkara tetap mengharuskan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, sesuai ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah disediakan, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk mediator hakim bukan pemeriksa perkara bagi mereka (Pasal 11 PERMA 1 Tahun 2008) Proses mediasi tetap harus dilaksanakan karena di dalam pertimbangan putusan hakim wajib disebutkan bahwa perkara telah diupayakan mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya.

- b. Sifat negatif para pihak

Para pihak memiliki sifat-sifat negatif yang menghambat atau tidak mendukung tercapainya mediasi, misalnya :

- 1) Sifat tingginya harga diri dari masing-masing pihak
- 2) Sifat merasa paling benar, sehingga tidak mau mengalah sedikit pun
- 3) Sifat mau menang sendiri sehingga tidak mau berkorban demi kebaikan ke dua belah pihak (*win-win solution*)

- 4) Sifat lebih puas terhadap apa yang diputuskan oleh majelis hakim
- 5) Sifat kekawatiran adanya mediasi mengakibatkan tidak terpenuhinya seluruh keinginan yang dituntut oleh masing-masing pihak.

Sifat-sifat negatif para pihak sedikit banyak berkaitan dengan kultur atau budaya masyarakat, yang sebetulnya tidak sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat Jawa Tengah khususnya kultur masyarakat di daerah Surakarta, yang penuh toleransi, ramah dan mudah mengalah untuk kebaikan bersama.

Solusinya, dalam hal ini dibutuhkan kemahiran dan kesabaran dari mediator untuk memotivasi, mendorong dan memberi pengertian kepada para pihak, khususnya mengenai banyaknya manfaat dengan tercapainya mediasi, yang dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta menyelesaikan sengketa secara tuntas. Sengketa tidak mungkin muncul kembali. Budaya Jawa juga mengajarkan bahwa, "Wong ngalah duwur wekasani" (Orang yang mau mengalah akan memperoleh kebaikan).

Mediator yang baik tidak cepat putus asa dalam mengusahakan perdamaian, sehingga para pihak mau mengorbankan sebagian kepentingannya demi tercapainya perdamaian. Sebagai contoh perkara Nomor 53/Pdt.G/2009/PN.Ska, Perkara Nomor: 177/Pdt.G/2009/PN.Ska, dan Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2010/PN.Ska. Ke tiganya merupakan perkara wanprestasi dimana masing-masing pihak mau mengorbankan sebagian kepentingannya demi tercapainya mediasi.

- c. Terlibatnya pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan.

Apabila suatu sengketa perdata tidak hanya melibatkan penggugat dan tergugat, tetapi melibatkan juga pihak ke tiga yang sebetulnya mempunyai kepentingan, khususnya yang berhubungan dengan harta kekayaan pihak ketiga tersebut, maka proses mediasi tidak akan berhasil, karena ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam mediasi, tetapi tidak dapat dilibatkan, karena tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan.

Solusinya, dalam hal demikian ini mediator dapat menyatakan mediasi telah gagal, karena pihak yang terlibat dalam

mediasi tidak lengkap. Untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi perlu diadakan pengajuan gugatan baru yang melibatkan pihak ke tiga tersebut, sehingga dalam proses mediasi semua pihak yang terlibat dapat ikut berperan.

d. Pengaruh pihak ketiga

Para pihak sendiri seringkali mempunyai itikad baik untuk melaksanakan mediasi, tetapi mendapat pengaruh tidak lebih dari pihak ketiga, dapat terdiri atas saudaranya dari masing-masing pihak atau temannya, yang mempengaruhi para pihak untuk lebih baik melanjutkan pemeriksaan perkara sampai dengan putusan hakim daripada membuat kesepakatan mediasi dengan resiko semua yang dituntut belum tentu dapat terpenuhi.

Solusinya, mediator harus memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk meyakinkan para pihak tentang lebih bermanfaatnya mediasi daripada perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dengan menekankan bahwa yang akan menikmati hasilnya nanti adalah para pihak sendiri, bukan pihak ke tiga yang mempengaruhinya.

e. Peran advokat sebagai kuasa hukum para pihak.

Advokat sebagai kuasa hukum masing-masing pihak dapat berperan positif dengan mendorong dan memotivasi kliennya untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, tetapi dapat juga berperan negatif dengan cara menghalangi kliennya untuk mengadakan mediasi. Alasannya kuasa hukum menilai bahwa kesepakatan mediasi akan merugikan kliennya, di sisi lain fakta yuridis kliennya berada di pihak yang menang, sehingga akan mendapatkan hak atau bagian yang lebih besar dari isi kesepakatan mediasi.

Advokat yang tidak menghendaki adanya mediasi dapat menghalangi para pihak *in person* untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang sudah dijadwalkan dalam proses mediasi, sehingga mediator tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak *in person*. Hal ini menghambat proses mediasi karena kemungkinan keinginan dan kehendak para pihak berbeda dengan keinginan dari kehendak dari kuasa hukumnya.

Kekawatiran kuasa hukum bahwa adanya kesepakatan perdamaian akan mengurangi biaya dalam rangka menangani suatu perkara tidak perlu terjadi, karena mengenai biaya untuk kuasa hukum dapat dinegosiasi antara kuasa hukum dan klien, berapa besar biaya untuk kuasa hukum apabila tercapai mediasi, dan berapa jika proses pemeriksaan dilanjutkan sampai dengan putusan hakim, sebab adanya mediasi paling tidak biaya untuk sidang –sidang akan banyak berkurang.

Solusinya : Advokat sebagai kuasa hukum harus menyadari sepenuhnya tujuan dan manfaat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu selain mediasi akan menghemat waktu biaya dan tenaga, juga akan mengurangi penumpukan perkara di tingkat banding dan kasasi, serta mengurangi jumlah sengketa yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kuasa hukum yang berhasil mendorong dan memotivasi terciptanya perdamaian merupakan prestasi tersendiri. Biaya yang mungkin berkurang setelah adanya perdamaian dapat diperjanjikan sebelumnya antara klien dengan kuasa hukum.

f. Terbatasnya jumlah mediator

Jumlah mediator yang masuk dalam “daftar mediator” di Pengadilan Negeri Surakarta. Sebetulnya cukup banyak ada 10 mediator yang tercantum dalam daftar mediator, terdiri atas empat mediator hakim dan enam mediator bukan hakim, tetapi pada umumnya para pihak selalu memilih mediator hakim, karena tanpa dipungut biaya dan mudahnya komunikasi.

Jika dibandingkan antara jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan setiap tahunnya lebih kurang 150 perkara, yang semua harus melaksanakan proses mediasi, maka jumlah mediator hakim yang harus menangani proses mediasi akan mendapat beban yang cukup berat, baik dari sisi pikiran, tenaga dan waktu yang harus disediakan untuk melaksanakan proses mediasi. Hakim mediator selain bertugas sebagai mediator juga harus menangani perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, baik sebagai ketua majelis hakim, maupun sebagai anggota majelis hakim.

Solusinya, perlu penambahan jumlah mediator hakim di setiap pengadilan negeri, termasuk Pengadilan Negeri Surakarta khususnya mediator hakim yang sudah bersertifikat sebagai mediator.

g. Kurangnya Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Sampai sekarang sudah dua tahun berlakunya PERMA tersebut, sehingga sudah cukup waktunya seluruh warga negara Indonesia mengetahui dan memahami ketentuan dalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bagi kalangan penegak hukum, khususnya para hakim dan advokat, pada umumnya mereka telah memahami ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga majelis hakim memeriksa perkara maupun mediator tidak perlu menjelaskan lagi tentang segala substansi materi PERMA. Bagi para pihak yang berperkara khususnya perkara perdata di pengadilan, sebagian ada yang sudah memahami PERMA tersebut tetapi ada juga yang sama sekali belum mengetahui, sehingga majelis hakim memeriksa perkara maupun mediator perlu menjelaskan ketentuan-ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Solusinya: Perlu diadakan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kepada masyarakat umum, khususnya di kota-kota kecil dalam acara penyuluhan hukum, baik yang diadakan oleh pengadilan maupun oleh para akademisi dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Faktor-faktor penghambat mediasi tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan proses mediasi secara menyeluruh di Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan di dalam PERMA, khususnya mengenai pelaksanaan prosedur mediasi dapat berlaku efektif dan dilaksanakan sepenuhnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Beberapa hambatan yang timbul tidak

disebabkan oleh ketentuan-ketentuan di dalam PERMA, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor di luar PERMA, yaitu faktor manusianya. Hambatan dapat muncul dari para pihak sendiri, kuasa hukum, terbatasnya mediator hakim, dan mereka yang berada di sekitar para pihak.

Menurut Lawrence Friedman, suatu sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Soerjono Soekanto, 1988: 35). Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah memenuhi ke tiga unsur tersebut:

a. Struktur hukum

Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pada peradilan di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh undang-undang (Pasal 130 HIR/154 Rbg), maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Mahkamah Agung perlu menetapkan suatu peraturan sambil menunggu peraturan undang-undang yang baru.

b. Substansi Hukum

Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg mengatur dapatnya para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. PERMA Nomor 2 Tahun 2003, yang diharapkan dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide dan harapan masyarakat terhadap berlakunya sistem hukum. Mediasi yang diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sangat sesuai dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan berdasar serta musyawarah untuk mufakat.

Untuk ketentuan prosedur mediasinya sendiri dapat berjalan seperti yang ditentukan di dalam PERMA, tetapi mengenai hasil mediasi masih dipengaruhi factor-faktor yang menghambat, yang dating dari sikap-sikap negative manusia dengan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan mediasi gagal atau tidak berhasil.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai suatu peraturan hukum mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. PERMA tersebut mempunyai kekuatan berlaku yuridis karena merupakan peraturan yang melaksanakan secara terperinci peraturan di atasnya yaitu Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai peraturan dasarnya. Berlaku secara sosiologis artinya PERMA tersebut berlaku efektif dilaksanakan oleh mediator hakim di pengadilan negeri dan dapat dipaksakan berlakunya dengan sanksi pembatalan putusan hakim, yang di dalam proses pemeriksaannya tidak melaksanakan prosedur mediasi. Berlakunya secara filosofis artinya mediasi sesuai dengan cita-cita hukum yang tercantum dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta sudah terlaksana kecuali Pasal 24 dan 25. Ketentuan yang telah dilaksanakan 10 mediator sudah dipersiapkan, dan dicantumkan dalam daftar mediator, yang terdiri atas empat mediator hakim, satu mediator dari akademisi dan lima mediator dari advokat. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator, meskipun kenyataannya para pihak lebih memilih mediator hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara selalu mengharuskan para pihak menempuh mediasi pada hari sidang pertama jika para pihak ke duanya hadir di dalam sidang, bahkan pada sidang pertama tersebut para pihak sudah harus memilih mediator. Ketua majelis hakim akan membuat surat penetapan mediator pada hari itu juga. Kewajiban untuk mengharuskan para pihak menempuh mediasi berpengaruh pada pertimbangan putusan hakim yang harus mencantumkan apakah tahap mediasi sudah dilaksanakan, dengan mencantumkan nama mediatornya. Jika kewajiban mediasi tidak dilakukan putusan hakim dapat

dibatalkan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Proses mediasi dilaksanakan dengan itikad baik dari pada para pihak dan dilakukan di ruang mediasi secara tertutup, dalam tenggang waktu dua sampai tiga minggu, lebih cepat dari tenggang waktu yang ditentukan yaitu 40 hari kerja. Mediator harus bersikap netral dan memberikan alternatif-alternatif yang saling menguntungkan bagi para pihak supaya mediasi dapat tercapai. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian yang telah disetujui para pihak diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan akta perdamaian, yang kekuatannya sama dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Jika mediasi gagal pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap memberikan kesempatan mediasi dalam proses pemeriksaan selanjutnya sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Ada beberapa Pasal dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang belum dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Pasal 24 dan Pasal 25, mengenai adanya pedoman perilaku mediator, kriteria keberhasilan serta insentif hakim mediator. Hal ini disebabkan mahkamah agung sendiri belum menetapkan pedoman tersebut, sehingga pengadilan negeri belum dapat melaksanakan.

Faktor penghambat terlaksananya mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, para pihak tidak menghendaki mediasi pada proses pemeriksaan di pengadilan negeri karena sudah putus asa karena gagalnya usaha mediasi yang sudah berkali-kali dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Para pihak memiliki sifat-sifat negatif yang menyulitkan tercapainya mediasi, misalnya sifat tingginya harga diri, merasa paling benar, tidak mau mengalah sedikit pun, lebih puas menerima putusan hakim, karena perdamaian mengakibatkan tidak terpenuhinya seluruh tuntutan masing-masing pihak. Peran advokat yang justru menghalang-halangi tercapainya mediasi dengan alasan kekawatiran kliennya mendapatkan kerugian dengan mediasi, atau karena alasan ambisi pribadinya atau pun karena alasan yang menyangkut biaya sebagai kuasa hukum. Terbatasnya jumlah mediator hakim sehingga beban kerja para mediator hakim terlalu banyak, karena para pihak hampir semua memilih mediator hakim karena tidak dipungut biaya dan mudahnya komunikasi. Terlibatnya pihak ketiga yang tidak disebutkan di dalam gugatan, sehingga tidak dapat dilibatkan dalam proses mediasi. Pengaruh pihak ke tiga, saudara atau teman para pihak yang justru

mendorong para pihak untuk lebih puas menerima putusan hakim daripada menerima hasil mediasi. Kurangnya sosialisasi PERMA Nomor 1 tahun 2008, khususnya bagi para pihak yang tidak diwakili oleh advokat sebagai kuasa hukum. Solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam proses mediasi sebetulnya tergantung dari para pihak sendiri yang dapat mengatasi dengan bantuan pengarahan-pengarahan dari mediator yang dapat memberikan pengertian, pemahaman dan keinsyafan untuk menerima kenyataan bahwa tercapainya mediasi lebih bermanfaat dan menguntungkan para pihak daripada dilanjutkannya proses pemeriksaan.

F. Saran

Kepada Mahkamah Agung disarankan segera membuat pedoman perilaku mediator yang berisi peraturan tentang tatacara mediator dalam

menjalankan tugasnya dalam proses mediasi, serta mengatur insentif bagi mediator hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator, sehingga ada *reward* untuk mediator hakim yang berhasil mendamaikan para pihak. Selanjutnya para advokat perlu ditekankan agar selalu memotivasi dan mendorong kliennya untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan mediasi. Selain hal tersebut disarankan pula kepada para hakim untuk mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan MA melalui BAMI yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menambah jumlah mediator hakim yang telah bersertifikat, sesuai dengan jumlah sengketa perdata yang diperiksa pengadilan negeri yang bersangkutan. Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 harus intensif dilakukan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan manfaat mediasi bagi para pihak yang terlibat sengketa perdata di pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani.1980.*Hukum dan Peradilan*.Bandung : Alumni
- Adi Sulistiyono.2010."Mediator Skill" *Makalah* Disampaikan pada Pelatihan Mediasi, Kerjasama BMBH Fakultas Hukum UNS dan Badan Mediasi Indonesia, pada tanggal23 Januari 2010
- Miks Natheu B Huberman A, 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru)* Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta,UI-Press.
- M. Taufiq.2010."Pengantar Mediasi" *Makalah* Disampaikan Pada Pelatihan Mediasi, Kerjasama BMBH Fakultas Hukum UNS dengan Badan Mediasi Indonesia, pada tanggal 9 Januari 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Normin S. Pakpahan.2010 . "Merancang Kesepakatan dan Kode Etik Mediator" *Makalah* Disampaikan pada Pelatihan Mediasi, Kerjasama BMBH Fakultas Hukum UNS dan Badan Mediasi Indonesia pada tanggal 17 Januari 2010.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.2009.*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Satjpto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. 1985. *RIB / HIR. Dengan Penjelasan*. Bogor : Politea.
- Sudikno Mertokusumo.2002.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Sukanto.1988.*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.Jakarta : Rajawali.
- Th. Kussunaryatun.1982. *Faktor Penghambat Perdamaian di Pengadilan Negeri Surakarta*. Fakultas Hukum UNS
- Yahya Harahap.2004.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta : Sinar Grafika.